

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Idealnya sebuah negara (*polis*) hadir untuk menciptakan tatanan hidup bersama yang adil dan sejahtera bagi setiap individu. Dalam catatan sejarah bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia, kondisi hidup yang ideal bagi seluruh elemen negara menjadi cita-cita bersama. Hidup yang ideal dalam sebuah bangsa berarti terciptanya suatu tatanan yang adil dan sejahtera di mana setiap individu dibebaskan dari segala bentuk kemiskinan. Kemiskinan adalah sesuatu yang buruk. Sebagaimana ditegaskan oleh Franz Magnis-Suseno, kemiskinan mempunyai dua akibat buruk yang dapat merongrong martabat orang miskin. *Pertama*, kemiskinan adalah sebuah kondisi hidup di mana kebutuhan dasar mereka yang miskin sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat tidak terpenuhi. *Kedua*, kemiskinan mengakibatkan ketergantungan total mereka yang miskin dari kemauan individu dan kelompok tertentu. Dalam hal ini kemiskinan merupakan keadaan kekurangan atau ketakberdayaan (*powerlessness*) secara ekonomi maupun non-ekonomi.¹

Dengan rumusan lain, kemiskinan adalah sebuah keadaan yang tidak bersifat alamiah, melainkan disebabkan oleh tindakan manusia, misalnya pengabaian hak, terbatasnya akses, marginalisasi, eksklusi, pendidikan, minimnya partisipasi dalam pelbagai level keputusan penting atau pun eksplorasi dalam proses pembangunan.² Kemiskinan merupakan situasi atau keadaan, di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia (kemiskinan mutlak dan absolut). Kemiskinan ialah suatu kondisi multi-dimensi dari

¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 340-341.

² Bandingkan untuk konteks perang dan kelaparan misalnya analisis Le Billon. P. et al. (2000) *The Political Ekonomi Of War: What Relief Agencies Need To Know*. Network Paper 33. London: ODI dan Keen, D. (1994) *The Benefits Of Famine: A Political Ekonomi If Famine And Relief In Southwestern Sudan, 1983-1989*, Princenton, NJ: Princenton University Press. dikutip Cypri Jehan Paju Dale, *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni Dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. (Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013), hlm. 18.

keberlangsungan hidup manusia dan tidak hanya berkaitan dengan ukuran kurangnya pendapatan. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup banyak aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, hukum, partisipasi politik, keamanan. Kemiskinan menyebabkan seseorang sulit untuk mengakses hak akan pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan layak secara kemanusiaan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dan rasa aman, hak untuk berpartisipasi atas pemerintahan dan keputusan publik.

Dalam bidang politik kemiskinan perempuan perlu mendapat perhatian dalam pembangunan karena perempuan termasuk dalam kelompok yang rentan untuk diabaikan dalam pembangunan. Masalah feminisasi kemiskinan merupakan masalah besar yang telah menimpa kehidupan mereka secara politik.

*The “feminisation of poverty” means that women have a higher incidence of poverty than men, that their poverty is more severe than that of men and that poverty among women is on the increase.*³

("Feminisasi kemiskinan" berarti bahwa perempuan memiliki kasus kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, kemiskinan mereka lebih parah dibandingkan laki-laki, dan kemiskinan di kalangan perempuan terus meningkat). Feminisasi kemiskinan merupakan kondisi atau keadaan ketidakberdayaan perempuan dalam pelbagai bidang termasuk bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Menurut Ollenburger dan Moore sebagaimana dikutip oleh Azizah Alie dan Yelli Elanda, feminisasi kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan atau kegoyahan perempuan secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik.⁴ Feminisasi kemiskinan merupakan ketidakberuntungan perempuan atas hak-haknya akibat

³ Hermine Naghdalyan, “The feminisation of poverty” Armenia, Alliance of Liberals and Democrats, 27 April 2007. <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11513&lang=EN#P185_18055> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

⁴ Azizah Alie dan Yelli Elanda, “Feminisasi Kemiskinan dan Daya Lenting Ibu Rumah Tangga di Kota Surabaya” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6:2 (Surabaya: Desember 2021), hlm. 204.

kebijakan-kebijakan bias gender dalam bidang politik.⁵ Pembahasan tentang kemiskinan perempuan tidak bisa hanya dilihat dari perspektif ekonomi saja tetapi juga dari aspek sosial, budaya dan politik.

Salah satu sebab utama feminisasi kemiskinan adalah minimnya partisipasi politik perempuan. Data menunjukkan sebagaimana yang dirilis oleh komisi pemilihan umum bahwa jumlah keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen pada periode 2019-2024 dengan total 118 orang (20,5%) dari keseluruhan jumlah anggota dewan yang berjumlah 575 orang.⁶ Pada periode 2019-2024, jumlah keterwakilan perempuan merupakan pencapaian yang tertinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Periode 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuan hanya mencapai 97 perempuan atau sekitar 17,3%.⁷ hasil keterpilihan perempuan dalam pemilu 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2009. Tercatat perolehan kursi keterwakilan anggota legislatif perempuan pada pemilu 2014-2019.⁸ Dalam hasil pemilu 2009 perempuan meraih 101 (18%) kursi dewan perwakilan rakyat (DPR), dan 36 (27%) kursi dewan perwakilan daerah (DPD), dan untuk DPRD provinsi, perempuan meraih kursi DPRD rata-rata 16% dari 33 provinsi, dan kursi DPRD kabupaten/kota rata-rata 12% dari 487 kabupaten/kota se Indonesia.

Data di atas menunjukkan adanya ketimpangan, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan di mana mereka mengalami beban yang mengungkung kehidupan perempuan. Perempuan masih belum diberikan kesempatan yang sama untuk menempati posisi yang sama di ruang publik. Keterlibatan mereka dalam politik masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah partisipasi laki-laki dalam bidang politik. Rendahnya keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam bidang politik berdampak buruk bagi eksistensi perempuan. Jumlah keterlibatan atau partisipasi perempuan yang masih terbilang rendah tentukan akan sangat berdampak

⁵ *Ibid.*, hlm. 204-205.

⁶ Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang", *Kajian*, Vol. 25, No. 1, Maret 2020. hlm. 24.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sekertariat Jenderal DPR RI, 2014. dalam Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen". *Jurnal Agastya*, 6:1(January 2016), hlm. 31.

buruk terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro perempuan. Dalam usaha pengentasan kemiskinan perempuan dibutuhkan suatu kekuatan besar dan juga upaya-upaya konkret untuk dapat mengatasinya.

Dalam tulisan ini penulis lebih menyoroti masalah feminisasi kemiskinan di Indonesia sebagai akibat dari minimnya partisipasi mereka dalam pembangunan. Jadi kemiskinan di sini tidak terutama dipahami sebagai kurangnya pendapatan, melainkan terutama sebagai kurangnya partisipasi perempuan (absennya demokrasi) dalam pembangunan. Masalah kemiskinan yang dialami kaum perempuan di negara-negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia khususnya merupakan masalah yang cukup pelik. Kaum perempuan belum sepenuhnya mendapat kebebasan dan hak yang sama di tengah masyarakat. Perempuan masih dibelenggu oleh begitu banyak faktor yang membuat mereka tetap terkurung dalam zona kemiskinan dan penderitaan.

Menurut Gusty Rikarno, partisipasi dalam kehidupan bersama (sosial, ekonomi, politik) merupakan wujud kesadaran memperjuangkan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.⁹ Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan dalam hidup bersama (sosial, ekonomi, politik) harus dipandang sebagai sesuatu yang penting (keharusan). Keterlibatan perempuan mesti dinilai sebagai ungkapan dan wujud untuk mencapai nilai moral yang paling tinggi. Hal ini dapat dinilai sebagai wujud pengungkapan jati diri manusia sebagai makhluk politik (*homo politikon*). Manusia akan kehilangan salah satu bagian penting dalam dirinya sebagai manusia ketika ia tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam proses politik.¹⁰

Menurut penulis, partisipasi merupakan satu sisi penting yang dapat menentukan arah dan jalannya pembangunan. Politik pembangunan yang ideal mensyaratkan keterlibatan warga negara dalam keseluruhan pembangunannya. Semakin luas tingkat keterlibatan atau partisipasi warga negara, semakin baik pula

⁹ Gusty Rikarno, *Feminisme Kahlil Gibran: Upaya Pembelaan Terhadap Martabat Perempuan* (Yogyakarta: Atap Buku, 2018), hlm. 73.

¹⁰ *Ibid.*

proses dan orientasi pembangunan itu.¹¹ Karena itu tanpa partisipasi, pembangunan itu mungkin sulit dijalankan dalam sebuah komunitas negara. Sejarah mencatat bahwa masalah feminisasi kemiskinan merupakan hasil konstruksi pembangunan yang tidak melibatkan kaum perempuan dalam pembangunan. Agen-agen pembangunan memandang kemiskinan perempuan seakan-akan sebagai akibat dari kondisi alami akibat keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada diri perempuan itu sendiri.

Partisipasi politik warga negara memiliki nilai yang sangat fundamen dalam hubungannya dengan kehidupan sebuah negara (*polis*). Karena itu keterlibatan warga negara harus dipandang sebagai haknya untuk terlibat dan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas publik, tentang bagaimana pemerintah yang seharusnya dibentuk dan juga kekuasaan itu dilaksanakan.¹² Dalam kaitannya dengan itu, praksis politik di Indonesia selama beberapa dekade lalu, belum menunjukkan wajah politik dan semangat demokrasi yang sesungguhnya. Terutama wajah demokrasi yang berperspektif gender. Realitas kemiskinan masih terus mewarnai panggung kehidupan perempuan di Indonesia. Perempuan hanya dimintai partisipasinya pada tahap pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan oleh para elite politik.¹³ Pada tahap ini perempuan hanya memainkan peran atau sebagai pelaksana dari apa yang sudah ditentukan oleh kelompok elite politik atau penguasa. Hal ini berdampak buruk terhadap kehidupan perempuan dalam pembangunan di Indonesia. Tanpa keterlibatan dan partisipasi perempuan maka sulit terciptanya pembangunan yang berpihak pada perempuan.¹⁴

¹¹ Anwar Ilmar. "Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis?", *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 3:1 (Jakarta: Maret-Agustus 2017). hlm. 4.

¹² Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik, Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles* (Maumere: Ledalero, 2010), hlm. 6.

¹³ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁴ Julia Suryakusuma, "Politik Sarung dan Susu: Perempuan dan Demokrasi Perempuan Indonesia di Era Orde Baru, Reformasi dan Era MOOI (Militerisme, Otoritarianisme, Oligarki dan Islamofasisme)", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, Herlambang P. Wiratraman. (ed.), "Demokrasi Tanpa *Demos* : Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia", (Depok: Penerbit LP3ES, 2021), hlm. 380.

Sebagaimana diungkapkan oleh Yosef Keladu Koten, demokrasi sejatinya mengandaikan keterlibatan aktif warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari proses pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.¹⁵

Sebagai landasan teoretis, tulisan ini merujuk pada etika politik sebagaimana dikembangkan dan dipahami oleh Peter L. Berger atau Johannes Müller yang memahami pembangunan sebagai upaya pembebasan manusia dari semua bentuk penderitaan. Bentuk yang paling nyata adalah kemiskinan, kelaparan, penyakit, diskriminasi (secara sosial, budaya, religius dan politik) dan penindasan. Manusia juga bisa menderita jika ia diperlakukan sebagai obyek kebijakan pembangunan, atau jika ia dipaksa tunduk pada tradisi budaya yang *inhuman*. Berger atau Müller hendak mengatakan bahwa pembangunan mesti memperhitungkan biaya manusiawi (*calculus of meaning and calculus of pain*)". Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau biaya-biaya manusiawi itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun tidak bisa dibenarkan.

Dalam pengertian pembangunan demikian tersirat suatu filsafat manusia yang pusatnya adalah manusia konkret yang menderita. Titik pangkal dan tujuan pembangunan adalah manusia yang menderita. Dalam pengertian seperti itu, tersirat pula pilihan yang mendahulukan kaum miskin dan partisipasi kognitif. Alasannya adalah bahwa segala kebijakan pembangunan harus bertujuan mendukung bantuan swadaya, sebab orang kecil yang paling mengenal kesusahan mereka, mereka jugalah yang paling berkepentingan memperbaiki keadaan mereka. Maka, partisipasi aktif mereka amatlah penting, bukan saja dalam pelaksanaan rencana politik pembangunan dan program bantuan, melainkan juga dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dari bawah (demokrasi) merupakan syarat mutlak keberhasilan pembangunan.

¹⁵ Yosef Keladu, *op.cit.*, hlm. 3.

Karena itu, untuk merespons masalah feminisasi kemiskinan, Peter L. Berger, mengemukakan dua imperatif etis sebagaimana yang dikutip oleh Johannes Müller, *pertama*, manusia berhak atas partisipasi dan *kedua*, partisipasi itu juga mencakup segi kognitif. Jadi, manusia juga berhak untuk ikut serta dalam menafsirkan dan “memakna-kan” dunia dan kenyataan yang ia hadapi. Kalau tidak demikian, maka sangat besarlah bahaya bahwa rakyat menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil terlepas dari pengetahuan dan kepentingan-kepentingan rakyat sendiri, manusia tidak boleh dipandang dan dilakukan sebagai obyek pembangunan.¹⁶

Dengan rumusan lain, partisipasi kognitif memainkan peran yang amat penting sebagai langkah pembebasan derita. Karena setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Wajah dan semangat pembangunan demokrasi akan nampak manakala semua orang terlibat dan berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Keterlibatan masyarakat menjadi syarat atau langkah untuk mengupayakan keadilan dalam bidang politik membutuhkan kesadaran dari para elit politik, kelompok penguasa, masyarakat dan perempuan itu sendiri. Menurut penulis langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi kognitif perempuan dapat ditempuh melalui jalur pemberdayaan perempuan (eksternal dan internal), pendidikan politik, dan juga melalui proses mekanisme pengkaderisasian yang baik.

Dengan beberapa alasan di atas, penulis ingin mengelaborasi lebih dalam partisipasi perempuan dalam pembangunan sebagai jalan pengentasan kemiskinan perempuan di Indonesia. Untuk itu, penulis memberi judul skripsi ini, “PARTISIPASI KOGNITIF PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SEBAGAI JALAN PENGENTASAN FEMINISASI KEMISKINAN DI INDONESIA”

¹⁶ Johannes Müller, “Pembebasan Manusia dari Penderitaan” (pengantar), dalam: Peter L. Berger, “Piramida Kurban Manusia”, penerj. A. Rahman Tolleng (Indonesia: LP3ES; Anggota IKAPI, 1982), hlm. xviii.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah skripsi ini ialah: sejauh mana partisipasi perempuan dalam pembangunan memberikan kontribusi penting bagi usaha pengentasan kemiskinan di kalangan perempuan di Indonesia? Dari rumusan masalah utama ini, dapat juga dirumuskan beberapa pokok permasalahan turunan seperti bagaimana potret kemiskinan perempuan di Indonesia, apa yang dimaksudkan pembangunan? Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendorong partisipasi kognitif perempuan sebagai jalan pengentasan feminisasi kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penulisan skripsi ini ialah: *Pertama*, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana partisipasi berkontribusi positif terhadap usaha pengentasan kemiskinan di kalangan perempuan di Indonesia. Pada bagian ini, penulis memperlihatkan secara kritis mengenai bahaya atau dampak dari ketiadaan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Indonesia. *Kedua*, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting perempuan sebagai subjek pembangunan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat akademis yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan. Penulis membaca buku-buku dan jurnal-jurnal tentang demokrasi dan politik terutama yang berkaitan dengan tema pembangunan

(feminisasi kemiskinan). Penulis berfokus pada pengaruh konstruksi budaya, ekonomi dan politik yang tidak pro gender dalam masyarakat. Selain itu, penulis juga membaca dan mendalami beberapa buku yang berisi pemikiran feminisme dan juga beberapa buku politik pembangunan Peter L. Berger. Karena itu, hal ini menjadi sangat penting guna menemukan ide solutif dalam mengupayakan dan menciptakan kemajuan dalam pembangunan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi kedalam empat bagian. BAB I: pada bagian ini penulis menguraikan alasan pemilihan judul yang terkandung dalam latar belakang. Pada bagian yang lain dalam bab ini, penulis memaparkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi.

BAB II: pada bab ini, penulis akan menjelaskan potret feminisasi kemiskinan perempuan di Indonesia. Penulis akan menguraikan beberapa bagian penting terutama tentang feminisasi kemiskinan perempuan dalam bidang politik di Indonesia.

BAB III: pada bagian ini, penulis menjelaskan beberapa landasan teoretis tentang kemiskinan, pembangunan, partisipasi kognitif menurut Peter L. Berger. Pada bab ini penulis mengawali pembahasan tentang definisi kemiskinan dan pembangunan di Indonesia. Penulis akan masuk pada partisipasi kognitif dalam pandangan Peter L. Berger.

BAB IV: Pada bagian ini, penulis akan memproposalkan atau mengajukan beberapa ulasan-ulasan praktis cara meningkatkan partisipasi kognitif perempuan dalam pembangunan di Indonesia.

BAB V: Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan penulis terhadap keseluruhan penjelasan terhadap substansi skripsi. Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan tentang bagaimana mendorong partisipasi kognitif perempuan sekaligus untuk memajukan kualitas pembangunan di Indonesia.